



panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

LAPORAN HASIL EVALUASI SPBE 2023

PEMERINTAH KAB.
MURUNG RAYA



DIGITAL GOVERNMENT
SPBE SUMMIT
KEMPINSKI GRAND BALLROOM - JAKARTA



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwa kegiatan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2023 dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi SPBE merupakan amanat dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang bertujuan untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas penerapan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Harapan kami, hasil evaluasi SPBE tahun 2023 dapat menggambarkan penerapan tata kelola SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, serta dapat digunakan sebagai pedoman oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dalam perbaikan penerapan SPBE dalam rangka keterpaduan yang selaras dengan kebijakan nasional. Selain itu, evaluasi SPBE juga diharapkan dapat berdampak pada terciptanya layanan SPBE yang berkualitas, terintegrasi, berkesinambungan, dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi bagi aparatur sipil negara Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, serta bermanfaat bagi pelaku usaha dan masyarakat luas.

Kami mengucapkan terima kasih atas kerja sama yang baik antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk Kementerian/Lembaga anggota Tim Koordinasi SPBE Nasional, Tim Asesor Eksternal Perguruan Tinggi, Instansi Pusat, dan Pemerintah Daerah. Berkat adanya kerja sama dan sinergi yang baik tersebut, pelaksanaan Evaluasi SPBE tahun 2023 dapat berjalan dengan baik dan sesuai harapan.

Jakarta, 26 Januari 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh :

NANIK MURWATI

Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata
Laksana

NIP. 197208081996032001

EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2023

Ringkasan Eksekutif

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Untuk memastikan pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah selaras dengan prinsip terintegrasi dan terpadu, maka Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan menerapkan unsur-unsur SPBE sesuai dengan kerangka kerja Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE agar penerapan SPBE dapat berjalan efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas dan optimal. Untuk mengukur perkembangan penerapan SPBE di Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional melaksanakan Evaluasi SPBE. Pada tahun 2023, telah dilaksanakan Pemantauan SPBE dengan menggunakan instrumen sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE.

Hasil pelaksanaan evaluasi SPBE yang dilakukan pada tahun 2023 sebagaimana terlampir dalam Laporan Hasil Evaluasi ini diharapkan dapat digunakan dalam menentukan tindak lanjut yang harus dilakukan dalam mendorong peningkatan penerapan SPBE secara menyeluruh pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah di masa mendatang, dalam rangka meningkatkan kualitas layanan pemerintah kepada masyarakat dan terwujudnya digitalisasi pemerintah dalam kerangka reformasi birokrasi dan keterpaduan SPBE.

Dasar Hukum

- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Metodologi Evaluasi SPBE

Penerapan SPBE dinilai dengan metode tingkat kematangan SPBE yang merupakan kerangka kerja untuk mengukur derajat kematangan penerapan SPBE yang ditinjau dari kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE. Tingkat kematangan SPBE terdiri atas 5 (lima) level, dimana masing-masing level menunjukkan karakteristik kematangan tertentu pada kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE.

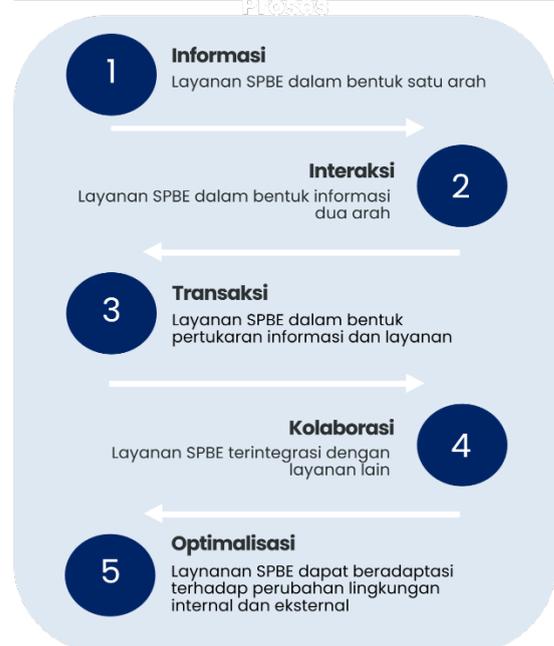
Penilaian evaluasi SPBE didasarkan pada informasi yang diberikan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melalui kegiatan penilaian mandiri, penilaian dokumen, penilaian interviu, serta penilaian visitasi (pada instansi tertentu).

Tingkat Kematangan Penerapan SPBE

Tingkat Kematangan pada Kapabilitas Proses



Tingkat Kematangan pada Kapabilitas Fungsi



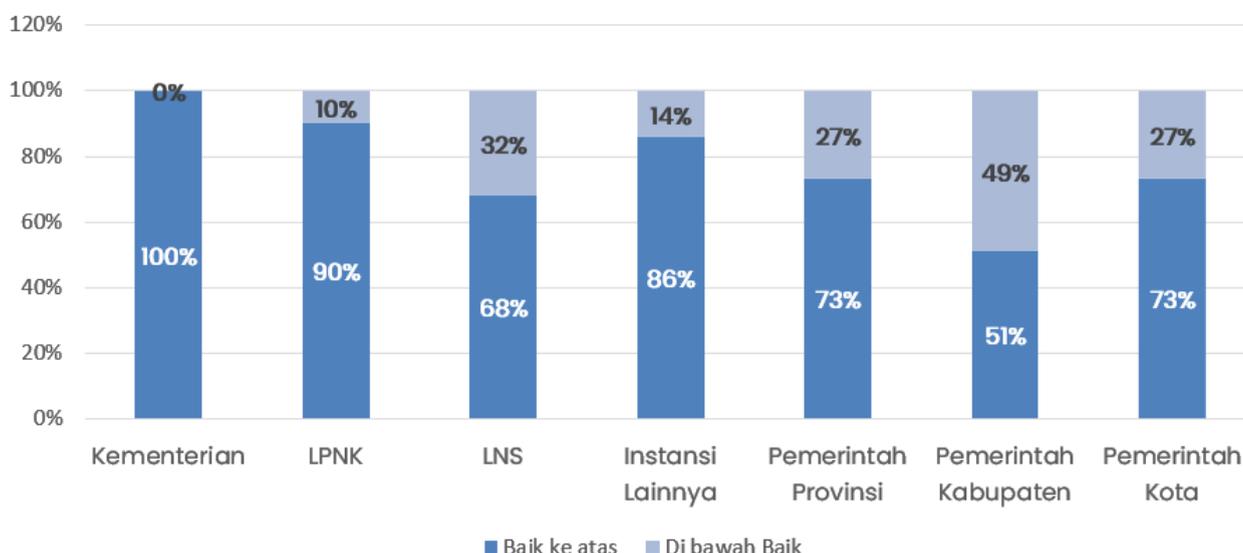
EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2023

Domain dan Aspek Penilaian	Bobot	Predikat Indeks SPBE																		
Domain 1 - Kebijakan SPBE	13%	<table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>NILAI INDEKS</th> <th>PREDIKAT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>4,2 – 5,0</td> <td>Memuaskan</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>3,5 – < 4,2</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>2,6 – < 3,5</td> <td>Baik *)</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>1,8 – < 2,6</td> <td>Cukup</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>< 1,8</td> <td>Kurang</td> </tr> </tbody> </table>	NO	NILAI INDEKS	PREDIKAT	1	4,2 – 5,0	Memuaskan	2	3,5 – < 4,2	Sangat Baik	3	2,6 – < 3,5	Baik *)	4	1,8 – < 2,6	Cukup	5	< 1,8	Kurang
NO	NILAI INDEKS		PREDIKAT																	
1	4,2 – 5,0		Memuaskan																	
2	3,5 – < 4,2		Sangat Baik																	
3	2,6 – < 3,5		Baik *)																	
4	1,8 – < 2,6		Cukup																	
5	< 1,8		Kurang																	
Aspek 1 - Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	13%																			
Domain 2 - Tata Kelola SPBE	25%																			
Aspek 2 - Perencanaan Strategis	10%																			
Aspek 3 - Teknologi Informasi dan Komunikasi	10%																			
Aspek 4 - Penyelenggaraan SPBE	5%																			
Domain 3 - Manajemen SPBE	16,5%																			
Aspek 5 - Penerapan Manajemen SPBE	12%																			
Aspek 6 - Audit TIK	4,5%																			
Domain 4 - Layanan SPBE	45,5%																			
Aspek 7 - Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	27,5%																			
Aspek 8 - Layanan Publik	18%																			

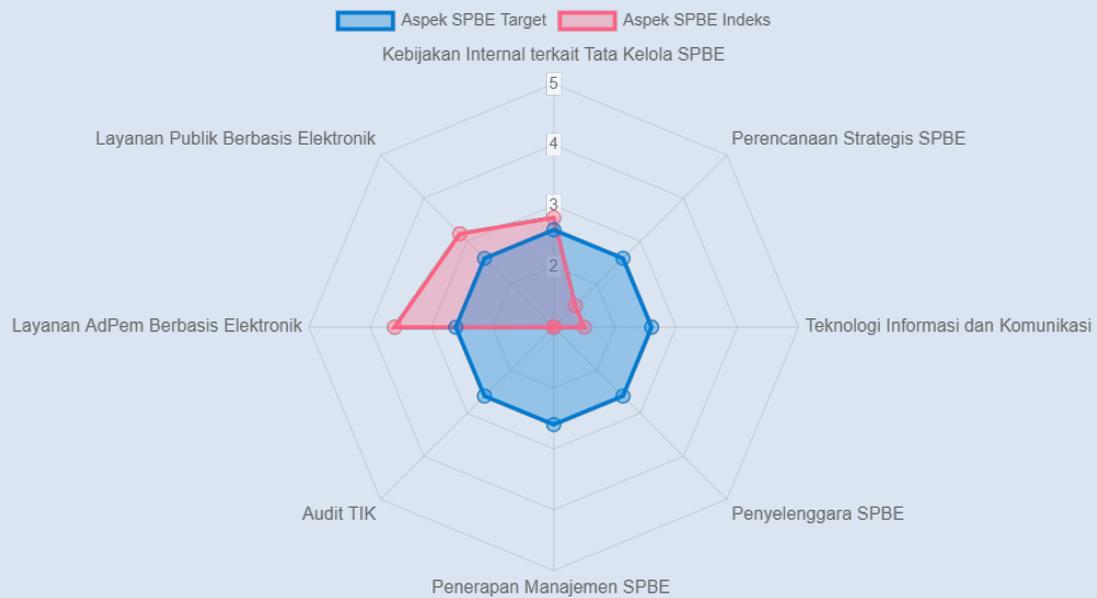
*) Target penilaian: Predikat Baik (indeks minimal 2,6)

Indeks	Rata-rata Nilai						
	Nasional	Kementerian	LPNK	Lembaga Lain	Provinsi	Kabupaten	Kota
SPBE	2,79	3,66	3,40	2,95	3,01	2,59	2,50
Domain Kebijakan	2,91	3,63	3,47	3,06	3,17	2,72	3,20
Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	2,91	3,63	3,47	3,06	3,17	2,72	3,20
Domain Tata Kelola	2,27	3,42	3,02	2,66	2,56	2,01	2,54
Perencanaan Strategis	2,10	3,18	2,92	2,63	2,31	1,86	2,26
Teknologi Informasi dan Komunikasi	2,37	3,57	3,20	2,68	2,72	2,09	2,70
Penyelenggaraan SPBE	2,43	3,62	2,88	2,68	2,72	2,18	2,79
Domain Manajemen	1,65	2,53	2,31	1,98	1,81	1,45	1,82
Penerapan Manajemen SPBE	1,68	2,53	2,32	2,03	1,79	1,49	1,85
Audit TIK	1,57	1,55	2,29	1,85	1,86	1,35	1,73
Domain Layanan SPBE	3,45	4,21	3,99	3,43	3,64	3,28	3,67
Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,45	4,16	3,95	3,56	3,64	3,30	3,61
Layanan Publik Berbasis Elektronik	3,45	4,30	4,06	3,24	3,65	3,27	3,77

Distribusi Indeks SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Predikat Tahun 2023



Nilai Indeks SPBE, Domain, dan Aspek



Nama Indeks	Nilai 2023
SPBE	2,44
Domain Kebijakan SPBE	2,80
<i>Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE</i>	2,80
Domain Tata Kelola SPBE	1,40
<i>Perencanaan Strategis SPBE</i>	1,50
<i>Teknologi Informasi dan Komunikasi</i>	1,50
<i>Penyelenggara SPBE</i>	1,00
Domain Manajemen SPBE	1,00
<i>Penerapan Manajemen SPBE</i>	1,00
<i>Audit TIK</i>	1,00
Domain Layanan SPBE	3,43
<i>Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik</i>	3,60
<i>Layanan Publik Berbasis Elektronik</i>	3,17

KEKUATAN DAN KELEMAHAN

A. Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE untuk Pemerintah Kabupaten Murung Raya telah terpenuhi untuk indikator Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE, Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana, Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data, Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE, Tingkat kematangan kebijakan internal layanan Pusat Data, Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra, Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung, Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi, Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE. Berdasarkan penjelasan dan data dukung yang disampaikan, maka pengaturan tersebut telah memenuhi kekuatan hukum kebijakan mengikat secara internal, Telah termuat PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA NOMOR 12 TAHUN 2023 dimana kebijakan terkait tata Kelola SPBE telah mengatur untuk keseluruhan referensi.

- **Kekuatan**
Pada Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE Pemerintah Kabupaten Murung Raya, belum ada indikator yang menjadi kekuatan.
- **Kelemahan**
Pada Pemerintah Kabupaten Murung Raya terdapat indikator yang menjadi kelemahan untuk aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE yaitu indikator tingkat kematangan kebijakan internal penggunaan sistem penghubung. Berdasarkan penjelasan dan data dukung yang disampaikan, maka pengaturan tersebut telah memenuhi kekuatan hukum kebijakan mengikat secara internal, Telah termuat PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA NOMOR 12 TAHUN 2023 pasal 14, namun kebijakan terkait sistem penghubung belum mencakup untuk keseluruhan uni kerja. Berdasarkan hal ini maka Kebijakan internal terkait Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah ditetapkan

B. Perencanaan Strategis SPBE

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Perancangan Strategis SPBE terdapat dua indikator yang sudah memenuhi yaitu indikator Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dan Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.

- **Kekuatan**
Pemerintah Kabupaten Murung Raya belum memiliki kekuatan pada indikator terkait aspek perencanaan strategis SPBE.
- **Kelemahan**
Pada Aspek Perencanaan Strategis, Pemerintah Kabupaten Murung Raya masih memiliki kelemahan untuk indikator Tingkat Kematangan Peta Rencana, Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE, Tingkat Kematangan Rencana dan Anggaran SPBE dan Tingkat Kematangan Rencana dan Anggaran SPBE. Data dukung yang dilampirkan tidak relevan dan beberapa indikator data dukung tidak dilampirkan. Pada indikator Tingkat Kematangan arsitektur dan Peta Rencana data dukung yang dilampirkan adalah sebuah dokumen master plan SPBE yang dapat dilihat sebagai kerangka dasar terkait arsitektur SPBE dan juga peta rencana. Dokumen tersebut adalah dokumen masterplan telah menunjukkan roadmap TIK peta rencana untuk program SPBE dari tahun 2021-2025 halaman 141, namun belum semua referensi arsitektur SPBE telah ada pada data dukung. Untuk indikator Tingkat Kematangan Rencana dan Anggaran SPBE dan indikator Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE data dukung tidak dilampirkan.

C. Teknologi Informasi dan Komunikasi

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Murung Raya yaitu pada indikator Layanan Pusat Data, Layanan dan Jaringan Intra Pemerintah Daerah.

- **Kekuatan**
Belum ada indikator yang menjadi kekuatan untuk aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- **Kelemahan**
Terdapat indikator yang masih menjadi kelemahan untuk Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Pemerintah Kabupaten Murung Raya yaitu Indikator Pembangunan Aplikasi SPBE, Layanan Pusat Data, Layanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah, penggunaan sistem penghubung dan layanan Pemerintah Daerah. Untuk indikator Pembangunan Aplikasi SPBE dan indikator tingkat kematangan penggunaan sistem penghubung layanan Pemerintah Daerah tidak ada data dukung yang dilampirkan.

Untuk Indikator Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data pada Pemerintah Kabupaten Murung Raya , dimana data dukung yang dilampirkan berupa beberapa SOP terkait layanan permintaan sub domain, hosting dan email dinas. Berdasarkan hal ini maka disimpulkan bahwa penerapan pusat data susah ada walau hanya melingkupi Sebagian layanan pusat data di IPPD. Untuk Indikator Tingkat kematangan layanan jaringan intra Pemerintah Daerah pada Pemerintah Kabupaten Murung Raya, dimana data dukung yang dilampirkan berupa file gambaran intra di IPPD. Berdasarkan Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah berada pada tingkat 2 Saat ini ada 28 SOPD, 1 Rumah Sakit dan 1 Kecamatan, yang terlayani oleh jaringan intra pemerintah milik Diskominfo SP Kabupaten Murung Raya masih mencapai 62,5% dari total 48 Perangkat Daerah, dibantu dari mitra Internet Service Provide, PT. PLN ICON

D. Penyelenggara SPBE

Secara keseluruhan pada aspek Penyelenggaraan SPBE Pemerintah Kabupaten Murung Raya belum ada indikator yang telah memenuhi.

- Kekuatan
Belum ada indikator yang menjadi kekuatan untuk aspek penyelenggara SPBE pada Pemerintah Kabupaten Murung Raya.
- Kelemahan
Pemerintah Kabupaten Murung Raya Indikator yang masih kategori lemah yaitu indikator Pelaksanaan Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah dan indikator kematangan Pelaksanaan Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah. Berdasarkan data dukung yaitu dokumen KEPUTUSAN BUPATI MURUNG RAYA NOMOR 188.45/228/2023 telah menunjukkan IPPD telah memiliki penetapan SK untuk tim koordinasi namun data dukung terkait pelaksanaan program kerja belum tergambar di data dukung yang dilampirkan.

E. Penerapan Manajemen SPBE

Secara keseluruhan pada aspek Penerapan Manajemen SPBE tidak ada indikator yang telah memiliki nilai pemenuhan aspek.

- Kekuatan
Belum ada indikator yang menjadi kekuatan untuk aspek penerapan manajemen SPBE pada pemerintah Kabupaten Murung Raya.
- Kelemahan
Pemerintah Kabupaten Murung Raya masih belum melaksanakan penerapan manajemen SPBE seperti Penerapan Manajemen Risiko SPBE, Penerapan Manajemen Aset TIK, Penerapan Manajemen Perubahan, Penerapan Manajemen Layanan SPBE dimana tidak ada data dukung yang dilampirkan

F. Audit TIK

Secara keseluruhan belum ada aspek Pelaksanaan Audit TIK yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Murung Raya.

- Kekuatan
Belum ada indikator yang menjadi kekuatan untuk aspek pelaksanaan audit TIK pada pemerintah Kabupaten Murung Raya
- Kelemahan
Pemerintah Kabupaten Murung Raya masih belum melaksanakan pelaksanaan Audit TIK seperti Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE, Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE, Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE dimana tidak ditemukan adanya bukti dukung atau pengaturan dalam pelaksanaan audit TIK yang disampaikan. Tidak ada data dukung yang dilampirkan.

G. Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik sudah dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Murung Raya yaitu indikator Layanan Perencanaan, Layanan Penganggaran, Layanan Keuangan, Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, Layanan Kepegawaian, Layanan Kearsipan Dinamis, Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Layanan Pengawasan Internal Pemerintah, indikator Layanan Pengawasan Internal Pemerintah, Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi, dan Layanan Kinerja Pegawai.

- Kekuatan
Pada Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik ini dapat terlihat indikator yang menjadi kekuatan yaitu indikator Layanan Perencanaan, Layanan Penganggaran, Layanan Keuangan, Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, Layanan Kepegawaian, Layanan Kearsipan Dinamis. Pemerintah Kabupaten Murung Raya telah menggunakan aplikasi berbagi pakai seperti Layanan administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik yaitu SIPD yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Murung Raya

sudah mampu memberikan layanan kolaborasi dengan layanan SPBE lainnya. Hal ini dibuktikan dengan beberapa tangkapan layar.

- Kelemahan
Pada Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik tidak ada indikator yang menjadi kelemahan pada Pemerintah Kabupaten Murung Raya.

H. Layanan Publik Berbasis Elektronik

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik yang sudah terpenuhi untuk semua indikator pada Pemerintah Kabupaten Murung Raya yaitu Layanan Pengaduan Pelayanan Publik, Layanan Data Terbuka, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), Layanan Publik Sektor 1, Layanan Publik Sektor 2, Layanan Publik Sektor 3

- Kekuatan
Adapun indikator yang menjadi kekuatan untuk aspek layanan publik berbasis elektronik adalah Layanan Pengaduan Pelayanan Publik, Layanan Publik Sektor 1 dan Layanan Publik Sektor 3. Pada pengaduan pelayanan publik sudah menggunakan aplikasi berbagi pakai yaitu aplikasi SP4N LAPOR yang dibuktikan dengan data dukung tangkapan layar penggunaan aplikasi ini. Untuk indikator layanan publik sektor 1 dan 3. Adapun aplikasi diajukan sebagai indikator pelayanan public sektor 2 adalah yang aplikasi SICANTIK dan aplikasi SIAK (Sistem Informasi Kependudukan) yang telah memiliki proses kolaborasi dan integrasi dengan aplikasi SPBE lainnya.
- Kelemahan
Namun disisi lain, Pemerintah Kabupaten Murung Raya masih belum memiliki Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik pada indikator Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka dan indikator Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). Pada indikator tingkat kematangan data terbuka Pemerintah Kabupaten Murung Raya menerapkan Aplikasi PPID yang dibangun oleh KEMENDAGRI untuk memenuhi kebutuhan pengelolaan dan pelayanan informasi oleh Badan Publik untuk penerapan Undang-undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) Aplikasi ini membantu badan publik dalam melakukan pendokumentasian serta melayani permohonan informasi kepada masyarakat yang sudah memenuhi level unggah dan unduh. Namun aplikasi belum menunjukkan telah memenuhi level transaksi. Untuk indikator tingkat kematangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Berdasarkan data dukung menunjukkan bahwa IPPD telah menerpkan Aplikasi JDIH yang diterapkan sudah memiliki kemampuan melayani unggah, file produk hukum, unduh data produk hukum, pencarian produk hukum. Namun JDIH belum memiliki fitur transaksi dan terintegrasi dengan aplikasi SPBE lainnya.

REKOMENDASI

Ringkasan

Secara prinsip, dengan adanya implementasi kebijakan internal, tata kelola, manajemen dan layanan SPBE akan mendorong peningkatan penerapan SPBE pada Pemerintah Kabupaten Murung Raya. Adapun dari hasil evaluasi SPBE yang telah dilakukan terhadap Pemerintah Kabupaten Murung Raya, menggambarkan predikat cukup dalam penerapan SPBE, Adapun dari hasil evaluasi SPBE yang telah dilakukan terhadap Pemerintah Kabupaten Belu terdapat beberapa keunggulan dan kelemahan.

Keunggulan

Pada Pemerintah Kabupaten Murung Raya, aspek yang memiliki keunggulan adalah aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik, pada aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Murung Raya telah menggunakan aplikasi berbagi pakai yang sebagian besar telah memenuhi level kolaborasi dan integrasi.

Kelemahan

Namun disisi lain, Pemerintah Kabupaten Belu masih memiliki beberapa kelemahan, khususnya pada aspek Perencanaan Strategis SPBE, aspek Audit TIK, aspek Penerapan Manajemen SPBE, aspek TIK dan aspek penyelenggara SPBE. Aspek-aspek ini bernilai rendah karena terdapat data dukung tidak dilampirkan dan beberapa data dukung yang dilampirkan tidak relevan dan tidak lengkap. Pada aspek audit TIK dimana tidak ditemukan adanya bukti dukung atau pengaturan dalam pelaksanaan audit TIK yang disampaikan. Pemerintah Kabupaten Murung Raya masih belum melaksanakan penerapan manajemen SPBE seperti Penerapan Manajemen Risiko SPBE, Penerapan Manajemen Aset TIK, Penerapan Manajemen Perubahan, Penerapan Manajemen Layanan SPBE walaupun beberapa indikator sudah dilengkapi dengan data dukung tetapi tidak tertuang dalam peta rencana.

Apresiasi Saran Perbaikan

Pada Aspek Kebijakan Tata Kelola yang masih belum optimal direncanakan dapat disusun dalam bentuk master plan atau perencanaan TIK. Untuk aspek perencanaan strategies dibangun kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi berdasarkan dari kebijakan yang telah disusun di Master Plan. Begitu juga untuk aspek lainnya seperti Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi, Aspek Penyelenggaraan SPBE dan Aspek Pelaksanaan Audit TIK. Untuk beberapa aspek agar dapat ditingkatkan dari nilai standar menjadi rerata unggul seperti pada aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik agar dapat meningkatkan aplikasi dengan proses reuiu secara berkesinambungan dan juga optimasi fungsi aplikasi. Untuk aspek kebijakan internal tata Kelola SPBE agar dapat melakukan reuiu dan tindak lanjut secara periodik dan juga optimasi kebijakan.

Perolehan Nilai Tingkat Kematangan Indikator

Target nilai tingkat kematangan untuk setiap indikator adalah minimal 3 (tiga)

No	Indikator	Nilai Tingkat Kematangan 2023
1	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	3
2	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	3
3	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data	3
4	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE	3
5	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Pusat Data	2
6	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi	3
7	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan	2
8	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi	3
9	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Audit TIK	3
10	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	3
11	Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2
12	Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2
13	Tingkat Kematangan Rencana dan Anggaran SPBE	1
14	Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE	1
15	Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE	1
16	Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data	2
17	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2
18	Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi	1
19	Tingkat Kematangan Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1
20	Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE	1
21	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE	1
22	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	1
23	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data	1
24	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK	1
25	Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia	1
26	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Pengetahuan	1
27	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan	1
28	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE	1
29	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE	1
30	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE	1
31	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE	1
32	Tingkat Kematangan Layanan Perencanaan	4
33	Tingkat Kematangan Layanan Penganggaran	4
34	Tingkat Kematangan Layanan Keuangan	4
35	Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	4
36	Tingkat Kematangan Layanan Kepegawaian	4
37	Tingkat Kematangan Layanan Kearsipan Dinamis	4
38	Tingkat Kematangan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah	3
39	Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	3
40	Tingkat Kematangan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	3
41	Tingkat Kematangan Layanan Kinerja Pegawai	3

42	Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik	4
43	Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka	2
44	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	2
45	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 1	4
46	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 2	3
47	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 3	4